



Konstruksi Media terhadap Sosok Legislator Perempuan (Analisis Framing Pemberitaan mengenai Peran Legislator Perempuan DPR RI periode 2009–2014 pada Harian *Kompas*)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Pinastika Intar Ardani

NIM : 14030112120014

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2016

ABSTRAK

Judul Skripsi:Konstruksi Media terhadap Sosok Legislator Perempuan (Analisis Framing Pemberitaan mengenai Peran Legislator Perempuan DPR RI periode 2009–2014 pada Harian *Kompas*)

Nama :Pinastika Intar Ardani

NIM :14030112120014

Jurusan :Ilmu Komunikasi

Media massa merupakan senjata bagi ideologi patriarkal untuk ditanamkan ke dalam pikiran masyarakat. Melalui pemberitaan yang bersifat bias jender, media dapat mempengaruhi sikap politik khalayak untuk memperjuangkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan harian *Kompas* mengenai sosok Legislator Perempuan DPR RI Periode 2009–2014.

Dalam upaya mencapai tujuan, penelitian dilakukan dengan menggunakan *muted group theory* sebagai salah satu varian teori kajian bahasa yang menjelaskan adanya “pembungkaman” melalui bahasa oleh kelompok dominan. Dengan menggunakan paradigma konstruksionis, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Subjek penelitian adalah pemberitaan mengenai legislator Perempuan DPR RI periode 2009–2014 pada media cetak *Kompas* pada tahun 2009 dan 2014.

Hasil penelitian menunjukkan pemberitaan *Kompas* berkontribusi dalam pelanggaran ideologi patriarkal. Pelanggaran ideologi tersebut ditampilkan pada pemberitaan mengenai peran legislator perempuan pada isu domestik hingga isu politik strategis. Ternyata, *Kompas* tidak sekadar “membungkam” kaum perempuan melalui pola penggunaan bahasa. Tetapi hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembingkaihan pada pemberitaan yang mengutamakan aspek popularitas legislator perempuan sebagai pelaku hiburan (*name makes news*) yang menimbulkan adanya “penjinakan”, *stereotyping* jender:domestifikasi, dan marginalisasi melalui “pembungkaman” dan pemunculan unsur “kelalaian” atau “peremehan” pada legislator perempuan. Menghadapi problematika seperti ini, khalayak sebaiknya lebih bersikap “melek media”. Para awak media pun seharusnya tidak terbelenggu dalam “lazy journalism”. Tantangan bagi aktivis serta politisi perempuan adalah meyakinkan para jurnalis profesional muda agar tidak terbelenggu pada stereotip-stereotip yang melucuti prestasi perempuan di bidang politik melalui pemberian wawasan kesetaraan jender.

Kata kunci:legislator perempuan, pembingkaihan berita, Kompas

ABSTRACT

Title:Media Construction of Female Legislators Figure (Framing Analysis about The Role of DPR RI Female Legislators from 2009-2014 Period in *Kompas* Newspaper)

Name :Pinastika Intar Ardani

NIM :14030112120014

Department :Communication Studies

The mass media is a weapon for the patriarchal ideology to implant into the minds of the public. Through the news that is gender bias, the media can influence public's political attitudes to fight for women's representation in parliament. The purpose of this study is to determine how *Kompas* does the framing about the figure of DPR RI Female Legislators from 2009 to 2014 period.

In order to achieve the goals, this research is done by using muted group theory as one variant of the theories that explains the "silencing/muting" language study through the language of the dominant group. By using constructionist paradigm, research is conducted using qualitative method and Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki framing analysis. The subjects of this study are the news about DPR RI female legislators 2009-2014 period from the printed version/newspaper of *Kompas* in 2009 and 2014.

The result of this study shows that the news in *Kompas* contributes to the perpetuation of patriarchal ideology. The perpetuation of this ideology is shown on the news regarding the role of female legislators on domestic issues to strategic political issues. Apparently, *Kompas* is not only silencing/muting women through the usage of language patterns, but it is also followed by the framing of the news that prioritizes the popularity aspect of female legislators as the entertainers (name makes news) that gives rise to the "taming", stereotyping gender: domestication, and marginalization through "silencing/muting" and the appearance of "trivialisation" or "disparagement" element of the female legislators. To face problems like this, the audience should become more media-literate. The media people shall also not be trapped into "lazy journalism". It is the challenge for the activists and female politicians to convince the young professional journalists in order not to be enslaved by stereotypes that degrade women's achievements in politics by providing insight about gender equality.

Keyword: female legislator, news framing, Kompas

**KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP SOSOK LEGISLATOR
PEREMPUAN (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MENGENAI
PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DPR RI PERIODE 2009–2014
PADA HARIAN *KOMPAS*)**

I. PENDAHULUAN

Selama ini politik selalu identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang masih kental akan budaya dan ideologi patriarkal, perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik. Kuatnya ideologi patriarki dan keyakinan agama yang menempatkan kaum laki-laki sebagai imam dan pemimpin menimbulkan pandangan bahwa laki-laki lebih mampu untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dan mengontrol perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Rupanya pandangan bahwa perempuan sekadar *konco sumur*, *dapur*, *kasur*, dan *konco winking* masih berlaku di tengah masyarakat Indonesia.

Hal ini berimplikasi pada hubungannya antara perempuan dan media. Dalam perkembangannya, jender telah menjadi ideologi yang terus dikonstruksi di dalam sistem kekuasaan yang patriarkis melalui ruang publik (media massa). Ketika terjadi perjuangan kesetaraan jender melalui partisipasi perempuan dalam bidang politik, wacana media massa melebar hingga ke pencitraan dan peran perempuan dalam berbagai sektor publik. Pada bagian inilah, kita dapat melihat ketidaksetaraan dan keterpinggiran perempuan dalam realitas media massa.

Banyak studi yang menunjukkan bahwa perempuan dalam arena politik sering kali harus berjuang untuk menerima liputan media dan legitimasi publik dan media. Pengajar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Saur Hutabarat menilai, pers Indonesia yang masih mengedepankan budaya patriarki dan liputan berita tentang kandidat politisi perempuan yang cenderung stereotip, menimbulkan pemberitaan yang tidak berimbang. Selain itu, Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang mengemukakan media online di Indonesia sepanjang 21 April 2014 hingga 17 April 2015 hanya menyorot figur perempuan hanya sebanyak 4%.

Media juga dianggap telah mendeskripsikan politisi perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata yang menekankan pada peran tradisional perempuan dan hanya memindahkan “ruang private” (persoalan dapur dan kamar) untuk dipertontonkan ke “dunia publik”: gaya hidup, fashion/penampilan, perceraian/percintaan, rumah tangga. Media, bukanlah suatu saluran atau sarana yang pasif seperti robot yang tugasnya hanya mendistribusikan pesan kepada khalayak luas, tetapi bersifat aktif, selektif, dan kritis. Melalui framing (pembingkai) media mampu membentuk realitas sosial yang akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok dominan (laki-laki) untuk menyebarkan dan mempertahankan ideologi patriarkal yang pada gilirannya akan memengaruhi jumlah dukungan yang diperoleh perempuan agar sukses dalam proses kandidasinya.

II. RUMUSAN MASALAH

Melalui teknik *framing*, para awak media, yang mayoritas adalah laki-laki, dapat mengkonstruksi realitas dan menciptakan opini publik sesuai dengan ideologi mereka. Sejak diberlakukannya kuota minimal 30% untuk calon legislator perempuan dan *zipper system* pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2014-2019 justru menurun. Faktanya, seputar 2009-2014 media arus utama justru cenderung selalu menampilkan pemberitaan mengenai legislator perempuan meliputi pekerjaan domestik perempuan. Dari sini, muncullah sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti, yakni bagaimana Harian *Kompas* membingkai legislator perempuan DPR RI periode 2009-2014 dalam pemberitaannya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendokumentasikan dan mengkliping setiap pemberitaan mengenai sosok legislator perempuan DPR RI periode 2009-2014 pada harian *Kompas*. Analisis *framing* dilakukan melalui model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Melalui model tersebut, kita dapat mengamati struktur sintaksis, skrip, tematik, retorik pada setiap pemberitaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Ideologi Patriarkal terhadap Legislator Perempuan pada Harian *Kompas*

Pada harian *Kompas* terdapat 46 berita mengenai peran sosok legislator perempuan DPR RI periode 2009-2014 yang dapat dibagi menjadi 16 tema, yakni Profil Legislator Perempuan, Pemilu, Ketenagakerjaan dan pengangguran, Minyak/tambang, Kesehatan, Antikorupsi/RUU Pengadilan Tipikor, Perlindungan Anak, Diskriminasi Masyarakat Adat, Pendidikan, Gender, Perdagangan, Revisi UU MD3, Internasional, RUU Pernikahan, Prolegnas, RUU Keistimewaan DIY. Setelah melalui tahap analisis *framing*, pemberitaan tersebut dapat dibagi menjadi 3 bingkai utama yang mengarah pada pelanggaran ideologi patriarkal. Hal tersebut dilakukan melalui pembingkai yang mengutamakan aspek popularitas sebagai pelaku hiburan, *stereotyping gender*: domestifikasi, dan marginalisasi pada legislator perempuan.

4.1 Name Makes News

Kompas seringkali melakukan pemilihan sosok legislator perempuan yang telah populer atau “punya nama”, yakni dari kalangan pelaku hiburan, baik yang ditampilkan pada profil sosok legislator perempuan pada rubrikasi “nama dan peristiwa”, maupun yang dijadikan sebagai narasumber mengenai isu-isu yang sedang dibahas oleh kalangan DPR. Sosok yang dipilih pun mayoritas merupakan selebriti yang memiliki penampilan cantik. Sayangnya, *Kompas* bukan memilih perempuan-perempuan luar biasa yang populer atau “punya nama” karena

prestasinya sebagai aktivis, akademisi, atau politisi. Dalam dunia jurnalistik, nama-nama tertentu, terutama *public figure*, memiliki nilai tinggi sebagai objek berita (*prominence*). Nilai berita *prominence* mengandung dimensi keulungan, kebesaran, dan popularitas pada objek berita (Potter, 2006:3) . Hal ini dikenal istilah *name makes news* (nama membuat berita).

Dipisahkan dari itu, *Kompas* bahkan masih sering mencampuradukkan atau menonjolkan pengalaman dan prestasi mereka sebagai legislator dengan aktivitas mereka sebagai pelaku hiburan. Hal ini juga didukung dengan labelisasi pelaku hiburan pada penggunaan diksi dan foto mereka dengan *full make up*. Ternyata, *Kompas* juga termasuk media yang “genit” dalam menampilkan sosok yang akan ia liput.

Kompas telah melakukan apa yang disebut Naomi Wolf sebagai “*apartheid gender*” (dalam Ibrahim dan Suranto, 1998:xxxii). Dengan pola pemberitaan yang cenderung lebih menyorot peran legislator perempuan pada sosok yang telah populer atau mengutamakan aspek *prominence/name makes news* dengan mencampuradukkan perannya sebagai legislator sekaligus pelaku hiburan, ketimbang tindak-tanduknya yang benar-benar terjun ke dalam dunia politik sebagai legislator, dapat “*menjinakkan*” sosok legislator perempuan dan membuat peran politik mereka menjadi tidak bergigi di benak khalayak.

4. 2 Stereotyping Gender:Domestifikasi Legislator Perempuan

Sebagai salah satu media massa, dapat diakui bahwa *Kompas* tidak hanya mampu mengangkat isu “praktis” perempuan, tetapi juga mampu mengangkat isu “strategis” perempuan. Isu praktis bersumber dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai perempuan. Isu strategis lahir dari adanya subordinasi perempuan dalam masyarakat yang mendorong keinginan untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil jender. Di tengah isu politik mainstream, seperti isu mengenai sistem pemilu dan dunia internasional, *Kompas* berhasil mengangkat isu strategis perempuan dan peran legislator perempuan. *Kompas* berhasil memunculkan “tanda” (suara dan pengalaman legislator perempuan) yang pada umumnya tersembunyi di lapis-lapis yang cukup dalam dari lapisan isu-isu politik *mainstream*. Walaupun terkesan memuji karena *Kompas* berhasil mengangkat isu strategis dan “tanda” perempuan dalam isu politik mainstream, sebenarnya *Kompas* masih melakukan stereotip untuk legislator perempuan menyangkut jenis kelaminnya. Jika diamati lebih jauh, penonjolan peran, suara, dan keberpihakan pada legislator perempuan lebih dominan pada isu-isu domestik atau “female issues”, seperti isu perlindungan anak dan kesehatan.

Ternyata, fenomena penonjolan peran dan suara legislator perempuan pada isu domestik yang dilakukan oleh *Kompas* dapat ditangkap oleh pemikiran sosiolog kontemporer, Emile Durkheim, yakni pembagian kerja secara seksual (*the sexual division of labour*) (Dellamont, 2003:110), yang juga berangkat dari feminis Marxis berfokus pada permasalahan perempuan dalam pembagian tenaga kerja dan pembagian modal. Selain itu, berkaitan dengan disebut oleh Veronica

Beechey (dalam Abbott, Wallace dan Tyler dalam 1990:157) sebagai “ideologi keluarga”, yakni ide yang dominan tentang bagaimana peran dan tanggung jawab gender dalam keluarga harus diorganisir. Karena laki-laki berpartisipasi pada urusan faktor ekonomi (nafkah) dalam sebuah keluarga pekerjaan yang terletak di dunia publik yang dalam pekerjaannya diberi upah dan lebih dihargai di masyarakat, maka perempuan dijatahkan untuk mengurus rumah tangga (domestik), yang memang tidak diberi upah, sehingga perempuan memiliki kontrol atau akses yang sedikit atas sumber daya (uang) dan memiliki ketergantungan pada laki-laki.

Walaupun seorang perempuan sudah menjadi politisi, meskipun dalam media, ia tetap akan dikonstruksi sesuai dengan pembagian kerja berdasarkan seksualitas. Komisi-komisi yang disorot pun mayoritas adalah komisi yang menangani bidang-bidang domestik, yakni komisi VIII (sosial/termasuk perempuan dan agama) dan komisi IX (kesehatan dan ketenagakerjaan). Adanya kosa kata yang menekankan tentang tempat perempuan di "ruang privat" semakin mendukung domestifikasi pada legislator perempuan. Penggunaan cap atau labelisasi domestik sangat terlihat jika kita amati melalui struktur retorik melalui penggunaan kata ganti sosok legislator perempuan, seperti “seorang ibu dari...”, “ibu dari... anak” atau “seorang istri dari...”. Penggunaan kata ganti tersebut seakan-akan ingin menekankan bahwa di samping posisi mereka sebagai legislator, mereka masih memiliki beban tanggung jawabnya dalam ranah domestik sebagai seorang ibu dan istri.

Hilary Graham (dalam Abbott, Wallace, dan Tyler, 2005:195) berpendapat bahwa perempuan merupakan penyedia perawatan kesehatan informal pada ekonomi domestik. Perempuan dipandang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga mereka. Sosok legislator perempuan pun dibingkai sebagai sosok yang merawat masyarakatnya. Hal ini terlihat pada isu di bidang kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, dan kemiskinan. Pada isu tersebut, legislator perempuan ditampilkan sebagai sosok yang peduli dan berperan terhadap kesehatan masyarakat, nasib anak-anak yang menjadi korban kekerasan, siswa miskin, TKI, bahkan pasien gangguan jiwa. Ternyata, *Kompas* belum memandang perempuan sebagai pihak yang mampu ikut andil dalam menentukan kebijakan atau pembuat keputusan (*policy maker*), khususnya dalam bidang politik strategis.

4. 3 Marjinalisasi Legislator Perempuan

Marjinalisasi membuat perempuan menjadi *other* dalam kultur yang diciptakan laki-laki (Beauvoir dalam Jurnal Perempuan, 2012:57). Dalam masyarakat patriarkal, perempuan tidak dianggap sebagai sosok *problem solver* dan pengambil keputusan, melainkan lebih dianggap sebagai “penyelundup” dalam dunia politik, karena wacana politik sering diidentifikasi sebagai domain laki-laki. Hal inilah yang terjadi ketika para legislator perempuan disorot perannya pada bidang politik strategis, di antaranya pada bidang minyak/tambang dan Antikorupsi/RUU Pengadilan Tipikor. Para legislator perempuan menjadi

objek yang dianggap bersalah, tidak profesional, dependen, dan suaranya dipinggirkan, sehingga menimbulkan skeptisisme atas peran dan kemampuan mereka.

Pada isu mengenai politik strategis, yakni minyak/tambang yang berfokus pada permasalahan pembengkakan dana di kilang minyak Blok Cepu, walaupun terdapat penyorotan peran legislator perempuan melalui kutipan mereka dalam memberikan solusi, namun yang ada seolah-olah suara mereka tenggelam dibandingkan dengan suara direktur BPH Migas yang memang seorang laki-laki. Walaupun solusi yang dipaparkan sama, namun suara yang lebih ditonjolkan melalui kutipan dalam berita adalah dari pihak BPH Migas, sehingga seolah-olah solusi tersebut berasal dari pihak BPH Migas.

Selain adanya peminggiran suara, marjinalisasi juga dilakukan melalui objektifikasi terhadap legislator perempuan sebagai sosok yang bersalah dan tidak profesional ketika mereka disorot saat mereka berperan pada pembahasan Antikorupsi dan RUU Pengadilan Tipikor. Alih-alih ingin mempertanyakan komitmen DPR atas usaha pemberantasan korupsi, *Kompas* justru mengobjekkan salah satu legislator perempuan, yakni Dewi Asmara sebagai “dalang” keterlambatan pengesahan RUU Peradilan Tipikor adalah Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor. Dewi Asmara, sebagai objek yang dijadikan sasaran pemberitaan pun tidak diberikan porsi yang seimbang untuk memberikan pernyataan atau klarifikasi atas keterlambatan RUU Peradilan Tipikor, yang ditonjolkan justru komentar pihak-pihak yang meragukan kinerjanya dalam menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor. Penyingkiran prinsip *cover both side* yang dilakukan oleh *Kompas* terhadap pembungkaman atas ketidakprofesionalan Dewi Asmara dalam pemberitaan mengenai RUU Pengadilan Tipikor memunculkan adanya “kelalaian” dan “trivialises/peremehan” pada legislator perempuan di dalam benak khalayak (Tuchman dalam Fountaine dan McGregor, 2002:3).

Dewi Asmara dan legislator perempuan lainnya merupakan beberapa sosok legislator perempuan yang seperti apa yang dikatakan oleh seorang Durkheimian, Shirley Ardener (dalam Dellamont, 2003:112) “dibungkam”, karena masih terdapat unsur “penghilangan” peran legislator perempuan pada isu-isu strategis/publik. Menurut pandangan sosiologi strukturalis Durkheim (dalam Dellamont, 2003:110), Ketika seorang perempuan mencoba terjun pada bidang yang selama ini dikenal sebagai “ranahnya laki-laki”, yakni politik, mereka akan mengalami “penghilangan” atau “pembungkaman” di tengah kelompok masyarakat karena dianggap sebagai ketidaksesuaian dan gangguan terhadap sistem yang mengatur lingkungan mereka.

Pembungkaman terhadap legislator perempuan juga dilakukan melalui pola penggunaan bahasa pada *Kompas* yang dapat memberikan kontribusi terhadap kelanggengan suatu stereotip dan peminggiran terhadap legislator perempuan pada isu politik strategis. Pada tahun 1975, ahli bahasa Robin Lakoff (dalam Kassian, 86:2005) berusaha menunjukkan tingkat penggunaan bahasa laki-

laki dan perempuan yang mengarah pada tingkat ketidakadilan seksual. . Efek keseluruhan pada bahasa adalah penenggelaman identitas pribadi perempuan melalui penyangkalan yang sangat kuat pada pengekspresian diri perempuan, terutama bagi legislator perempuan ketika ingin berperan penuh dalam dunia politik strategis.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Selama tahun 2009 dan 2014 telah ditemukan total 46 pemberitaan pada *Kompas* mengenai peran legislator perempuan DPR RI periode 2009-2014, terutama perannya pada fungsi legislasi dan pengawasan. Pemberitaan tersebut terbagi menjadi 16 tema atau isu, mulai dari isu domestik hingga isu politik strategis.
2. Pembingkaiian aspek popularitas legislator perempuan sebagai pelaku hiburan dilakukan oleh *Kompas* melalui pemilihan sosok legislator perempuan yang telah populer, yakni dari kalangan pelaku hiburan, baik yang ditampilkan pada profil sosok legislator perempuan maupun yang dijadikan sebagai narasumber mengenai isu-isu yang sedang dibahas oleh kalangan DPR. Hal ini juga didukung dengan pencampuradukan atau penonjolan pengalaman dan prestasi mereka sebagai pelaku hiburan dengan peran mereka sebagai legislator. Ternyata, *Kompas* termasuk media yang “genit” dalam menampilkan sosok yang akan ia liput, dan lebih mengutamakan nilai berita *prominance/name makes news*, ketimbang tindak-tanduk legislator perempuan ketika mereka benar-benar terjun ke dalam dunia politik. Hal ini menyebabkan citra legislator perempuan tidak bergigi di bidang politik dan terjadi “penjinakan” pada legislator perempuan.
3. Walaupun *Kompas* mampu memunculkan “tanda” (suara, pengalaman dan keberpihakan pada legislator perempuan) di tengah isu politik mainstream/strategis, namun dipisahkan dari hal tersebut ternyata *Kompas* melakukan stereotyping jender dengan cara mendomestifikasikan peran legislator perempuan dalam pembingkaiian beritanya. Secara tidak langsung, ternyata *Kompas* telah menerapkan pembagian kerja secara seksual (*the sexual division of labour*). Penonjolan peran, suara, dan keberpihakan pada legislator perempuan yang ditunjukkan *Kompas* lebih dominan pada isu-isu domestik atau "*female issues*", isu-isu tersebut diantaranya ketenagakerjaan/TKI, kesehatan, perlindungan anak, diskriminasi masyarakat adat, pendidikan, jender, perdagangan, dan RUU Pernikahan. Komisi-komisi yang disorot pun mayoritas adalah komisi yang menangani bidang-bidang domestik, yakni komisi VIII (sosial/termasuk perempuan dan agama) dan komisi IX (kesehatan dan ketenagakerjaan). Hal tersebut juga didukung dengan penggunaan cap atau labelisasi pada kosa kata yang menekankan tentang tempat perempuan di "ruang privat".

4. Marjinalisasi yang dialami oleh legislator perempuan pada pemberitaan *Kompas* dilakukan melalui pelucutan prestasi yang dipahatkan para Srikandi negeri dalam bidang politik strategis. Ketika legislator perempuan ditampilkan dalam isu-isu politik strategis, terutama isu mengenai minyak/tambang dan RUU Pengadilan Tipikor, mereka dibingkai sebagai sosok yang dianggap bersalah, tidak profesional, dan suaranya dipinggirkan, sehingga menimbulkan skeptisisme atas peran dan kemampuan mereka. Pelucutan prestasi di bidang politik strategis yang ditoreh oleh para Srikandi Senayan ini telah memastikan adanya “pembungkaman” dan pemunculan unsur “kelalaian” atau “peremehan” pada peran legislator perempuan.

5. 2 Implikasi

1. Implikasi Akademis

Asumsi pembungkaman perempuan ditindaklanjuti dengan penerapannya pada media massa yang ternyata pembungkaman tersebut tidak hanya dapat dilihat melalui penggunaan pola bahasa pada media, tetapi dapat dilihat juga melalui pembingkaiannya yang melanggengkan ideologi patriarkal.

2. Implikasi Praktis

Legislator perempuan tidak hanya diabaikan dan dirugikan dalam ideologi patriarkal, tetapi juga adanya kecenderungan bagi wartawan terbelenggu dengan "*lazy journalism*/jurnalisme malas". Artinya, wartawan lebih memilih untuk kembali pada suatu stereotip untuk menjelaskan fenomena.

5. 3 Rekomendasi

1. Rekomendasi Teoretis-Akademis

Melalui penelitian ini, dengan hasil yang menunjukkan adanya “pembungkaman”, “penjinakan”, domestifikasi, dan marjinalisasi pada pembingkaiannya media massa mengenai sosok legislator perempuan dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu penyebab mengapa selama ini keterwakilan perempuan di parlemen jumlahnya selalu minim.

2. Rekomendasi Praktis

Melalui penelitian ini khalayak diharapkan dapat bersikap “melek media” dalam menyaring pemberitaan-pemberitaan yang disajikan di media mengenai sosok-sosok perempuan yang berkiprah di dunia politik. Selain itu, sebagai saluran edukasi dan sosialisasi politik seharusnya media dapat bersikap *cover both side* dan tidak terbelenggu dalam “*lazy journalism*” dalam menampilkan sebuah fenomena. Cara mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan akademik mengenai wawasan kesetaraan jender bagi wartawan muda. Tantangan bagi aktivis serta politisi perempuan setelah mengetahui hasil penelitian ini adalah meyakinkan para jurnalis profesional muda agar tidak terbelenggu pada stereotip-stereotip yang melucuti peran dan prestasi perempuan di bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Pamela dan Claire Wallace dan Melissa Tyler. 1990. *An Introduction to Sociology: Feminist Perspective, third edition*. New York: Routledge
- Arivia, Gadis. 2012. *Jurnal Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan
- Burns, Lynette Sheridan. 2002. *Understanding Journalism*. London: Sage
- Campus, Donatella. 2013. *Women Political Leaders and The Media*. Great Britain : Palgrave and Macmillan
- Delamont, Sara. 2003. *Feminist Sociology*. London: SAGE Publications Ltd
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKIS.
- Ettema, James. S dan Charles Whitney. 1982. *Individuals in Mass Media Organization*. Beverly Hills : Sage Publication
- Fountaine, Susan and Judy McGregor. 2002. *Reconstructing gender for the 21st century: News media framing of political women in New Zealand*. New Zealand : Massey University
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto. 1998. *Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kassian, Mary A. 2005. *The Feminist Mistake*. Illinois: Crossway Books
- McHugh, Nancy Arden. 2007. *Feminist Philosophies A-Z*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd
- Potter, Deborah. 2006. *Handbook of Independent Journalism*. Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
- Riyadi, Berto. 2013. *Kinerja Anggota DPR Perempuan Kurang Disorot Media*. (<http://indonesiarayanews.com/news/politik-keamanan/04-11-2013-17-54/kinerja-anggota-dpr-perempuan-kurang> diunduh pada 8 Desember 2015)
- Kami, Indah Mutiara. 2015. *Melihat Gaya Anggota DPR Perempuan yang Curi Perhatian di Sidang Tahunan*. (<http://news.detik.com/berita/melihat-gaya-anggota-dpr-perempuan-yang-curi-perhatian-di-sidang> diunduh pada 10 Desember 2015)

Media Harian Cetak:

- Prioyombodo. *Nama & Peristiwa: Nurul Arifin*. Minggu, 25 Januari 2009. Kompas. hlm:32
- Kompas. *RUU Pengadilan korupsi: Dewi Asmara Ditolak jadi Ketua Panitia Kerja*. Sabtu, 22 Agustus 2009. hlm:4